

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017

Ika Fitriyani¹, Novi Kadewi Sumbawati², Bintang Puspita³

1. *Keuangan Perbankan, Universitas Samawa*

2. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

3. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Email : ikafitriyani@universitassamawa.ac.id

novikadewisumbawati@universitassamawa.ac.id

Bintangpuspita96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka – angka dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013-2017 seperti PAD dan Transfer pusat, Transfer provinsi dan Pinjaman. Penelitian ini menggunakan variabel mandiri, dalam hal ini adalah kemandirian keuangan daerah. Hasil pengukuran kemandirian daerah menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Transfer pusat, Transfer Provinsi dan Pinjaman selama tahun 2013 – 2017, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 sebesar 7,66%, tahun 2014 sebesar 12,28%, tahun 2015 sebesar 11,45%, tahun 2016 sebesar 9,72% dan pada tahun 2017 sebesar 17,59%. Dengan rata-rata kemandirian sebesar 11,72%. Kesimpulan dari hasil analisa bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 -2017 rendah sekali (instruktif) karenaberada diantara 0% dan 25%.

Kata Kunci: *Rasio Kemandirian, Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pusat, Transfer Provinsi dan Pinjaman.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah. Dampak perubahan yang luas dan mendasar khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebut perimbangan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonom daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2010: 136-149). Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud

adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010).

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Namun pada kenyataannya pendapatan daerah kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini masih sangat tergantung pada sumber-sumber anggaran *eksternal* untuk membiayai pembangunan, karena kemampuan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah.

Tabel 1.1
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013-2017

Uraian	Tingkat Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pendapatan Daerah	955.31	1154.7	1297.8	1,526.36	1,673.93	15.14
Pendapatan Asli Daerah	67.73	126.13	127.36	135.09	249.46	44.48
Pajak daerah	14.2	19.86	20.81	23.44	28.81	20.65
Retribusi Daerah	28.84	61.50	14.91	13.66	17.31	13.96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.63	16.72	19.65	20.10	67.03	68.99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.05	28.04	71.99	77.89	136.29	98.42
Dana Perimbangan	770.93	845.16	916.58	1,204.29	1,228.40	12.87
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.45	38.95	38.58	85.98	69.54	23.11
Dana Alokasi Umum	647.64	724.96	757.53	830.27	815.88	6.08

Dana Alokasi Khusus	79.84	81.24	120.47	288.04	342.97	52.05
---------------------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

Sumber: BPKAD Kab. Sumbawa

Keempat komponen PAD Kabupaten Sumbawa, secara persentase kontribusi masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda yakni pada tahun 2013 dan 2014 komponen retribusi memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp. 28.84 Miliar (42.59%) dan Rp. 61.50 Miliar (48.76%). Untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 komponen yang memberi sumbangan terbesar terhadap PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 71.99 Milyar (56,52%) pada tahun 2015, Rp. 77.89 Miliar (57,66%) pada tahun 2016 dan Rp. 136,29 Milyar (54.64%) pada tahun 2017 (*BPKAD Kab. Sumbawa*).

Realisasi Dana Perimbangan terus meningkat dari Rp. 770.93 Miliar (2013) hingga Rp.1,228.40 Miliar (2017) dengan pertumbuhan rata-rata 12.87%. Dari 3 komponen Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) masih memberikan kontribusi terbesar yakni berkisar dari Rp. 647.64 Miliar (84.01%) tahun 2013 hingga mencapai Rp. 815.88 Miliar (66.42%) pada tahun 2017. Demikian pula dengan tingkat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah berkisar antara Rp. 116.65 Miliar (2013) hingga Rp. 196.03 Miliar (2017)(*BPKAD Kab. Sumbawa*). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul“ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017** “

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUNo. 33 Tahun2004pasal 1 ayat (8), (9),(10) tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu (i) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; (ii) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; (iii) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan UU No. 28 Tahun 2009, Total Pendapatan Daerah (TPD) diperinci sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pinjaman.

Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengertian Keuangan Daerah dan Struktur APBD

Mamasah dalam Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Kemandirian Keuangan Daerah

Abdul Halim (2008:232) menyatakan bahwa, “Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.”

Rasio Keuangan Daerah

Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi (2010: 142) yaitu: Derajat Desentralisasi; Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010).

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi, maka digunakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang dirilis oleh Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010), dengan asumsi ketika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah semakin tinggi, maka sangat baik kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya jika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah kecil, maka tingkat desentralisasi fiskal daerah sangat kurang.

Tabel 1.2
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01-50.00	Baik
≥50.01	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma 2010)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi (Mahmudi, 2010). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui derajat kemandirian keuangan daerah, maka digunakan Kriteria dengan asumsi, semakin besar Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan maka kondisi kemandirian keuangan daerah semakin baik, sebaliknya semakin kecil Persentase PAD terhadap dana perimbangan maka kemandirian keuangan daerah semakin buruk criteria ketergantungan menurut Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010), sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00-10.01	Sangat Rendah
10.01-20.00	Rendah
20.01-30.00	Sedang
30.01-40.00	Cukup
40.01- 50.00	Tinggi
≥50.01	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma 2010)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010). Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah ;

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2007 :169) dikemukakan hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

Tabel 1.4
Kriteria Pola Hubungan dan Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2007).

METODE

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti suatu status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta , sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.(Nazir, 2009:54). Adapun pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka – angka dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013-2017.

Jenis Data

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan menggunakan angka – angka yang menunjukkan gambaran tentang objek maupun subjek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan berupa angka – angka dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun anggaran 2013-2017. Data kualitatif adalah data berupa keterangan untuk menjelaskan angka – angka atau deskripsi mengenai angka – angka yang berhubungan dengan objek maupun subjek penelitian. Data kualitatif yang digunakan berupa penjelasan/ gambaran umum tentang keuangan kabupaten Sumbawa.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pencatatan dokumen. Metode pencatatan dokumen yaitu, suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Ida Bagoes Mantra, 2008:15). Dalam Penelitian ini metode pencatatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2013-2017.

Identifikasi / Klasifikasi Variabel

Penelitian menggunakan variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Indikator dari variabel yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat, Transfer Provinsi, dan Pinjaman.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian menggunakan beberapa variabel, agar lebih jelas diuraikan operasional variabel penelitian sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan daerah adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Transfer pusat, provinsi dan pinjaman atau yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman kurun waktu tahun 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan dalam persen (%).
2. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Transfer pusat atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan dalam rupiah.
4. Transfer Provinsi adalah pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dalam kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan dalam rupiah.
5. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain dalam kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Sumbawa yang dinyatakan dalam rupiah.

Teknik Analisis Data

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat

dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Tabel 1.5
Kriteria Pola Hubungan dan Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2007).

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk melihat hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. Berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{67,871,443,321.30}{886,038,813,095.67} \times 100\% \\ &= 7,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{126,129,383,069.28}{1,026,346,434,467.71} \times 100\% \\ &= 12,28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{133,972,578,374.61}{1,168,812,621,806.79} \times 100\% \\ &= 11,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{135,092,854,266.71}{1,388,996,098,390.09} \times 100\% \\ &= 9,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{249,526,156,524.27}{1,418,306,016,483.00} \times 100\% \\ &= 17,59\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas di perolehlah hasil/ tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten sumbawa tahun 2013-2017. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2013	67.871.443.321,30	886.038.813.095,67	7,66	Rendah Sekali	Instruktif
2014	126.129.383.069,28	1.026.346.434.467,71	12,28	Rendah Sekali	Instruktif
2015	133.972.578.374,61	1.168.812.621.806,79	11,46	Rendah Sekali	Instruktif
2016	135.092.854.266,71	1.388.996.098.390,09	9,72	Rendah Sekali	Instruktif
2017	249.526.156.524,27	1.418.306.016.483,00	17,59	Rendah Sekali	Instruktif
Total	712.592.415.556,17	5.888.499.984.243,26	58,71	Sedang	Partisipatif
Rata-rata	142.518.483.111	117.771.999.684	11,74	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: BPKAD Kab. Sumbawa (diolah)

Dilihat dari tabel 4.3, maka untuk Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten sumbawa yang diukur dalam tahun, dimana untuk tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 7,66%, yang termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif karena berada diantara 0% dan 25%, untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 12,28%, yang juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif karena berada diantara 0% dan 25%, untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 11,46% dan 9,72% dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif karena berada diantara 0% dan 25%. Dan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 17,59% yang juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif. Dimana maksud dari pola Instruktif adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa,, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah sekali hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2013-2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten sumbawa selama lima tahun anggaran yaitu tahun 2013-2017 memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali yaitu sebesar 11,74% dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Berikut rincian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa : pada tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 7,66%, kemudian pada tahun 2014 naik sebesar 12,28%, pada tahun 2015 sebesar 11,46%, pada tahun 2016 turun sebesar 9,72%, dan pada tahun 2017 naik sebesar 17,59%.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Dalam Negeri, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kerlinger. 2006. Asas-Asas Penelitian Behavior. Edisi: 3 Cetakan 7. Yogyakarta: Gajah Mada. University Press.
- Mahmudi.2010.*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua.Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mardiasmo, 2000, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*, Makalah Seminar. MEP-UGM, Yogyakarta.
- Netra, Ida Bagus. (2008:15). *Metodelogi Penelitian*.Surabaya : Usaha Nasional.

Nining Sudiyarti (2013), *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Periode 2005-2011*

PP. Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah. Profil Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016*

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabet.